

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PEMERINTAHAN DI INDONESIA	1
1. KABINET PRESIDENSIAL	1
a. Presidensial dan Banyak Parpol	3
b. Kabinet Presidensial	5
2. RESHUFFLE DAN REFORMASI KABINET	6
a. Memenuhi Kepentingan Rakyat	7
b. Susunan Kabinet	8
3. EVALUASI AKUNTABILITAS PUBLIK KEMENTERIAN	9
a. Tugas Pokok Kementerian PAN dan RB	11
b. Akuntabilitas Kinerja	12
c. Akuntabilitas Publik	13
4. DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN URGENSINYA	15
a. Pemerintahan Demokratis	16
b. Dewan Perwakilan Daerah	17
c. Pemerintah Daerah	18
5. DINAMIKA PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA BIROKRASI YANG DEMOKRATIS	20
a. Pelayanan Klasik	20
b. Melayani Warga (<i>Citizenship Service</i>)	23
c. Camat dan Lurah/Kepala Desa Unit Pelayanan Terdepan	25

6.	BIROKRASI DAN PARTAI POLITIK	26
a.	Lelang Jabatan	28
b.	Pejabat Negara	29
7.	LEMBAGA BIROKRASI DALAM NEGARA	31
a.	<i>Grand Design</i>	36
b.	Penataan Kelembagaan Pemerintah	39
c.	Pemicu Reformasi	44
d.	Reformasi Regulasi.....	46
e.	Penutup	50
8.	UNDANG-UNDANG ETIKA PEMERINTAHAN	51
a.	Kemerdekaan Politik.....	52
b.	Etika Pemerintahan	53
BAB 2 MENEGUHKAN ASPIRASI KEBANGSAAN		57
1.	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI NEGARA KESATUAN	57
a.	Pembagian Kekuasaan Negara	58
b.	Pemda Desentralisasi atau Otonomi.....	59
c.	ASN di Negara Kesatuan	61
2.	NETRALITAS DALAM ADMINISTRASI NEGARA	62
a.	Netralitas Birokrasi Publik	63
b.	Tiga Wajah Birokrasi Publik	64
3.	MEMBANGUN KEMBALI BIROKRASI PEMERINTAH	66
a.	Pendahuluan.....	66
b.	Perubahan Paradigma	70
c.	Repositioning Birokrasi Pemerintah.....	73
d.	Lembaga Kabinet Pemerintah.....	77
e.	Kabinet Baru yang Akan Datang.....	81
f.	Demokratisasi Birokrasi	83
g.	Penutup	85
4.	MENEGUHKAN ASPIRASI KEBANGSAAN	86
a.	Calon Tunggal	87
b.	Aspirasi Pejabat Negara.....	88

c.	Rangkap Jabatan	90
5.	DEPARPOLISASI PEMERINTAH	91
a.	Partai Politik di Pemerintahan.....	92
b.	Jabatan Negara dan Jabatan Politik.....	93
c.	Rangkap Jabatan	95
6.	EVALUASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	97
a.	Pengantar	97
b.	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	98
c.	Sistem Manajemen Pemerintahan Daerah	102
d.	Perilaku Manajemen Pemerintahan Daerah	105
e.	Solusi yang Disarankan.....	106
7.	OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN	107
a.	Distribusi Kewenangan Pemerintahan	111
b.	Dimensi Administrasi	117
c.	Gubernur Dipilih Siapa	120
d.	Perubahan Sistem Politik	122
8.	REPOSISI OTONOMI DAERAH	123
a.	Otonomi Daerah	124
b.	Kepentingan Nasional	125
9.	KEPALA DAERAH DI NEGARA KESATUAN	127
a.	Kepentingan Altruistik Nasional.....	128
b.	Negara Kesatuan (<i>Unitary System</i>)	129
c.	Kepala Daerah di Negara Kesatuan.....	131
10.	DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN URGENSINYA	133
a.	Pemerintahan Demokratis	134
b.	Dewan Perwakilan Daerah	135
c.	Pemerintah Daerah.....	136
BAB 3	PERSPEKTIF BIROKRASI	139
1.	BIROKRASI: SUATU PENGALAMAN DIRI	139
2.	PERCAKAPAN IMAJINER DENGAN MAX WEBER	157

3.	KOMUNIKASI YANG MANUSIAWI	187
4.	KEPEMIMPINAN PARTISIPASITIF	214
5.	PERILAKU BIROKRASI	253
	DAFTAR PUSTAKA	263
	TENTANG PENULIS	265

